

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Saudi merupakan negara yang terletak di Jazirah Arab, berbatasan langsung dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman dan Laut Merah. Arab Saudi juga merupakan negara yang menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang diberlakukan di negara ini berdasar pada petunjuk islam dan berlandaskan pemahaman *salafussalih*, secara umum penduduknya bermahzab Hambali. Negara ini merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam, dan telah menjalin kerja sama dengan negara-negara lain di dunia melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

Salah satu negara Timur Tengah yang pernah menjalin hubungan bilateral dengan Arab Saudi adalah Suriah. Kedua negara tersebut menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1950 ketika perjanjian perdagangan ditandatangani pemerintah Arab Saudi. Hal ini menandai bahwa Arab Saudi memberikan dukungan finansial kepada Suriah. Beberapa perjanjian perdagangan lain sempat ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun hal tersebut dibatalkan oleh Raja Faisal pada 3 Mei 1966 karena keputusan sikap kontra yang ditunjukkan pemerintah neo-Baath di Suriah terhadap Arab Saudi. Pada tanggal 4 April 1972, kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi lain yang kemudian membuka jalur impor dan ekspor produk lokal antara dua negara tanpa biaya bea cukai untuk produk pertanian, peternakan, dan sumber daya alam. Hubungan baik yang terjalin antara Arab Saudi dan Suriah juga terlihat setelah Suriah menyatakan dukungan untuk koalisi dalam perang melawan invasi Kuwait, di mana Arab Saudi bersama dengan Kuwait menyalurkan bantuan hampir \$2,2-2,6 miliar kepada Suriah. Pada sepanjang tahun 1990-an Arab Saudi dan Suriah membangun hubungan positif sehingga pada bulan Februari 1991, sebuah komite bersama dibentuk oleh Arab Saudi dan Suriah, dan ini mendorong kerjasama ekonomi antar negara. Pada tahun-tahun setelahnya, Arab Saudi dan Suriah aktif menjalankan ekspor-impor sehingga kedua negara tersebut sepakat menandatangani kebijakan *free trade area* pada tahun 2001. Kedua negara tersebut juga bergabung dalam Greater Arab Free Trade Area (GAFTA).

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut menandakan bahwa kebijakan Arab Saudi terhadap Suriah terjalin secara positif dan memiliki intensi hubungan dagang yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, Arab Saudi mulai mengubah arah diplomatiknya saat Syria dilanda krisis konflik sejak tahun 2011. Syria merupakan negara yang juga terkena imbas fenomena Arab Spring, dimana pada saat itu rakyat Suriah menuntut reformasi terhadap struktur pemerintahan dan pergantian pemimpin. Demonstrasi terjadi di berbagai kota di Syria dibarengi

dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Syria yang menimbulkan banyak korban jiwa. (CSS Analysys, 2012)

Pada saat konflik tersebut terjadi, Arab Saudi condong mendukung kubu oposisi yang tentu menginginkan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan dan pergantian pemimpin. Arab Saudi juga merupakan negara pertama yang merespon dengan agresif peristiwa konflik internal Suriah tersebut. Hubungan diplomatik pada tahun-tahun sebelumnya menjadi berbalik arah diikuti oleh pernyataan resmi Raja Abdullah yang menyatakan bahwa pemerintah Suriah sebagai mesin pembunuh dan meminta masyarakat Suriah untuk menentang atas apa yang telah terjadi terhadap korban demonstran, dan dilanjutkan dengan penarikan duta besar Arab Saudi di Suriah (Nakamura, Saudi Arabian Diplomacy During the Syrian Humanitarian Crisis: Domestic Pressure, Multilateralism, and Regional Rivalry for an Islamic State, 2013).

Agresifitas politik luar negeri Arab Saudi semakin menekan negara tersebut ketika isu penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan Bashar Al-Assad terkuak. Arab Saudi mengupayakan intervensi militer dengan mengajukannya ke majelis umum PBB, dan meminta publik internasional untuk tidak mengabaikan apa yang telah terjadi di Suriah. Arab Saudi melakukan diplomasi politik bukan hanya di kawasan timur-tengah tetapi juga meminta Amerika Serikat untuk menyepakati perlunya intervensi militer ke Suriah seperti halnya yang terjadi di Libya. Arab Saudi telah memilih langkah-langkah politik luar negeri yang agresif menekan Suriah semenjak krisis tersebut terjadi. Pilihan-pilihan politik luar negeri Arab Saudi tersebut telah memosisikan Suriah sebagai ancaman. Bahkan tidak tanggung-tanggung Arab Saudi juga memberikan senjata dan juga dana untuk pihak oposisi pemerintahan Bashar Al-Assad. Arab Saudi juga adalah salah satu negara yang menganut sistem anarki absolut di timur tengah yang secara tidak langsung berhasil mengundang simpati para pengusaha dibawah naungan perusahaan *National Fundraising Campaign for Syrian* dan juga donator lainnya seperti King Salman yang pada saat itu masih berstatus Putra Mahkota yaitu Deputy Pertahanan Saudi sebesar 10 juta SR, Mobily perusahaan operator Saudi sebesar 3,4 SR. (Burdah, 2014)

Bantuan-bantuan tersebut disalurkan Arab Saudi untuk membantu kelompok oposisi Suriah. Hal ini kemudian mempertegas arah kebijakan luar negeri Arab Saudi yang berubah haluan yang sebelumnya menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintahan Suriah, beralih menjadi anti-pemerintahan Suriah. (Al-Riyad, 2011) Tindakan Arab Saudi dengan memutuskan hubungan diplomatik dan mendukung oposisi menjadikan hubungan kedua negara mencapai titik terendahnya. Tekanan-tekanan diplomatik yang diberikan Arab Saudi terhadap pemerintah Suriah tersebut tentunya mempunyai penyebab, serta alasan tertentu dan dilandaskan akan suatu motif atau kepentingan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas terbentuklah sebuah rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu **“Mengapa kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Suriah berubah pasca krisis konflik Suriah 2011?”**

C. Metode Penelitian

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah. Dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. library research; yakni teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Online research; yakni teknik mengumpulkan data secara daring, dari berbagai sumber data di internet melalui website resmi, situs berita, dan situs-situs kredibel yang menyertakan data-data terkait objek penelitian.

D. Kerangka Teori

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme menjelaskan masalah dalam fenomena hubungan internasional dengan menyatakan bahwa dunia sosial adalah buatan dari pada aktor. Aktor yang dimaksud dalam pengertian konstruktivisme adalah seseorang dengan pengaruh kuat, seperti pemimpin dan warga negara yang berpengaruh, yang mana aktor tersebut dapat terus-menerus membentuk dan terkadang membentuk kembali sifat dasar hubungan internasional melalui tindakan dan interaksi mereka.

Konstruktivisme melihat dunia dan apa yang dapat kita ketahui tentang dunia sebagai konstruksi sosial. Pandangan ini mengacu pada hakikat realitas dan hakikat pengetahuan yang disebut juga ontologi dan epistemologi dalam bahasa penelitian. Alexander Wendt (Wendt, *Constructing International Politic*, 1995) menggambarkan konstruksi sosial realitas seperti 500 senjata nuklir Inggris kurang mengancam Amerika Serikat daripada lima senjata nuklir Korea Utara. Identifikasi ini tidak disebabkan oleh senjata nuklirnya sebagai struktur material atau ancamannya melainkan oleh makna yang tersirat dalam struktur ideasional atau ideologi dari aktor ‘Korea Utara’. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa konstruktivis sendiri memasukkan bagaimana sebuah ide dan keyakinan berefek pada ranah politik dunia.

Nicholas Greenwood Onuf menyatakan bahwa negara-negara tidak ada ubahnya individu yang hidup di "World of Our Making." (Onuf, World of Our Making, 1989). Isu sentral lain dari konstruktivisme adalah identitas dan kepentingan. Konstruktivis berpendapat bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Identitas adalah representasi dari pemahaman aktor tentang siapa mereka, yang pada gilirannya menunjukkan minat mereka. Hal ini penting bagi konstruktivis karena identitas merupakan kepentingan dan tindakan.

Norma sosial juga merupakan pusat konstruktivisme. Ini umumnya didefinisikan sebagai 'standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu. (Katzentein, 1998) Negara yang sesuai dengan identitas tertentu diharapkan untuk mematuhi norma-norma yang terkait dengan identitas tersebut. Ide ini datang dengan harapan bahwa beberapa jenis perilaku dan tindakan lebih dapat diterima daripada yang lain. Proses ini juga dikenal sebagai "logika kesesuaian", di mana aktor berperilaku dengan cara tertentu karena mereka percaya bahwa perilaku ini sesuai.

Untuk lebih memahami norma, kita dapat mengidentifikasi tiga jenis: (a) norma regulatif, (b) norma konstitutif dan (b) norma preskriptif. Norma regulatif mengatur dan membatasi perilaku; norma konstitutif menciptakan aktor, minat, atau kategori tindakan baru; dan norma-norma preskriptif meresepkan norma-norma tertentu, artinya tidak ada norma yang buruk dari sudut pandang mereka yang mempromosikannya (Finnemore, 1998).

Penting juga untuk dicatat bahwa norma melewati 'siklus hidup norma' sebelum dapat diterima. Sebuah norma hanya menjadi perilaku yang diharapkan ketika massa kritis dari aktor negara yang relevan mengadopsinya dan menginternalisasikannya dalam praktik mereka sendiri. Misalnya, para konstruktivis berpendapat bahwa sebagian besar negara telah berkumpul untuk mengembangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan demi kelangsungan hidup umat manusia. Selama beberapa dekade diplomasi dan advokasi, menjadi perilaku yang sesuai yang diharapkan sebagian besar warga negara untuk dipatuhi oleh pemimpin mereka (Finnemore, 1998).

Struktur hubungan internasional 'dikonstruksi secara sosial' dan 'Struktur membentuk identitas dan kepentingan actor daripada hanya perilakunya'. Konstruktivis juga berpendapat bahwa hubungan sosial dibangun dengan sendirinya oleh 3 elemen yaitu *share knowledge, material resources and practices* (Finnemore, 1998). Dari perspektif konstruktivisme, norma internasional dapat mengubah dan membentuk pemahaman, gagasan, kepercayaan dan pengetahuan pembuat kebijakan, bahkan kepentingan negara.

Wendt berpendapat bahwa rezim internasional mendorong adanya "*a convergence in preferences and a sense of shared identity.*" Perspektif ini menunjukkan bahwa rezim

internasional dapat berdampak pada kebijakan dan perilaku: yaitu kepentingan (interests), pengetahuan (knowledge) dan institusi (Wendt,1998) Maksud dari ‘konstruksi’ sosial politik dunia adalah penciptaan melalui proses interaksi antar individu, negara, actor non negara dan struktur lingkungan yang lebih luas yaitu melalui proses konstitusi bersama antara agen dan struktur. Meskipun semua konstruktivis berbagi pandangan dan konsep yang disebutkan di atas, ada banyak variasi dalam konstruktivisme (Wendt, 1998).

Konstruktivis konvensional mengajukan pertanyaan tipe ‘apa’ seperti apa yang menyebabkan seorang aktor bertindak. Mereka percaya bahwa untuk menjelaskan dunia dalam istilah kausal dan tertarik untuk menemukan hubungan antara aktor, norma sosial, kepentingan dan identitas. Konstruktivis konvensional berasumsi bahwa aktor bertindak sesuai dengan identitas mereka dan memungkinkan untuk memprediksi kapan identitas ini menjadi terlihat atau tidak terlihat. Ketika sebuah identitas terlihat mengalami perubahan, konstruktivis konvensional menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan aspek mana dari identitas suatu negara berubah.

E. Hipotesis

Kebijakan Arab Saudi terhadap Syria berubah pasca krisis konflik 2011 disebabkan oleh:

- ‘Satu identitas’ dimana Arab Saudi memegang teguh ideologinya yakni Islam ‘Sunni’ sama seperti kelompok oposisi Suriah.
- Saudi Arabia melihat Iran sebagai poros ideologi Syiah dan rival utama semakin mendominasi politik Syria.

F. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Saudi Arabia Berubah Pasca 2011 Terhadap Syria”, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah **Mengetahui alasan dari perubahan kebijakan Arab Saudi terhadap Suriah pasca krisis konflik 2011.**

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Pada penelitian kali ini, penulis memfokuskan data pada kebijakan Arab Saudi terhadap Suriah pada periode

pemerintahan Raja Abdullah, di mana rentang waktu saat 2011-2015 agar penelitian tetap terfokus sebagaimana mestinya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. **BAB II**, Bab ini berisi tentang “*Kebijakan Arab Saudi terhadap Suriah Sebelum Konflik*” dan penjabaran mengenai kebijakan-kebijakan Arab Saudi sebelum konflik 2011

BAB III, Bab ini berisi tentang penjabaran mengenai “*Latar belakang konflik Suriah*” di mana akan membahas konflik pemerintahan Bashar Al-Assad

BAB IV Bab ini berisi tentang “*Perubahan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Terhadap Suriah Pasca Krisis Konflik Suriah 2011*”

BAB V, Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada penelitian ini.